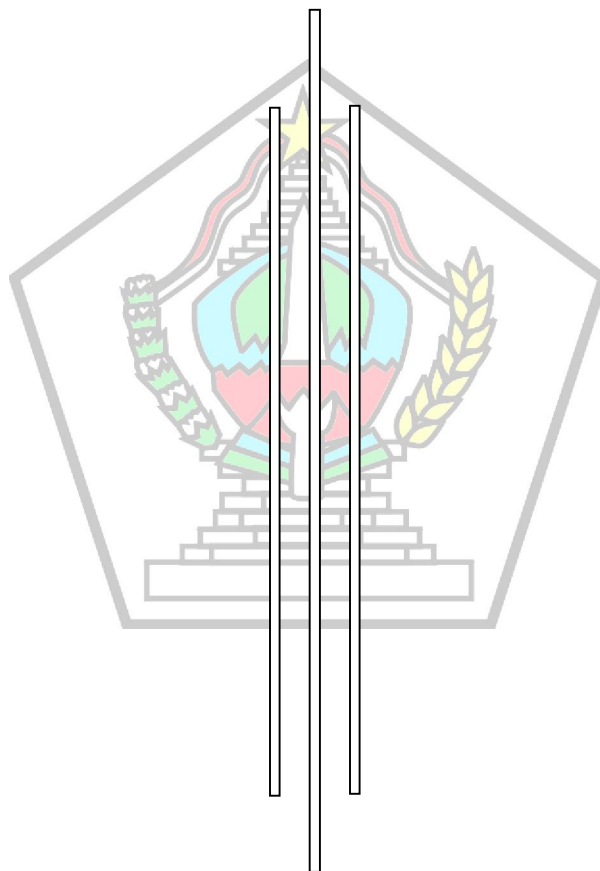




PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR



**LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
SEKRETARIAT DAERAH DAN Pos Bupati/Wakil Bupati
TAHUN ANGGARAN 2014
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2014**



DAFTAR ISI

Daftar isi

Pernyataan Tanggung Jawab

- I. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014**
 - 1. Realisasi Anggaran**
 - 2. Realisasi Program / Kegiatan**
- II. Neraca per 31 Desember 2014**
- III. Catatan Atas Laporan Keuangan**
 - 1. Pendahuluan**
 - 2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Program Pencapaian Target Kinerja SKPD**
 - 3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD**
 - 4. Kebijakan Akuntansi**
 - 5. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD**
 - 6. Lampiran - lampiran**



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah dan Pos Bupati / Wakil Bupati yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan.

Blitar, Januari 2015

Sekretaris Daerah

ttd

Drs. PALAL ALI SANTOSO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19561128 198603 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN BITAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
periode s.d 31 Desember 2014

Urusan Pemerintahan

Bidang Pemerintahan

Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

: 1

: 1 . 20

: 1 . 20 . 02

: 1 . 20 . 02 . 01

URUSAN WAJIB

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
2	BELANJA	581.809.000,00	555.320.115,00	(26.488.885,00)
2 . 1	BELANJA OPERASI	581.809.000,00	555.320.115,00	(26.488.885,00)
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	581.809.000,00	555.320.115,00	(26.488.885,00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(581.809.000,00)	(555.320.115,00)	26.488.885,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(581.809.000,00)	(555.320.115,00)	26.488.885,00

BLITAR, Januari 2015
Pengguna Anggaran

ttd
Drs. PALAL ALI SANTOSO, MM
NIP. 195611280198603 1 013



III.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

5.1 BELANJA **Rp. 555.320.115,00**

1. Belanja Tidak Langsung **Rp. 555.320.115,00**

1.1 Belanja Pegawai **Rp. 555.320.115,00**

Jumlah tersebut merupakan belanja gaji dan tunjangan serta belanja penunjang operasional Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	50.700.000,00
2	Tunjangan Keluarga	5.070.000,00
3	Tunjangan Jabatan	91.260.000,00
4	Tunjangan Beras	3.348.480,00
5	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	6.539.715,00
6	Pembulatan Gaji	1.920,00
	Jumlah	156.920.115,00

Belanja pegawai lainnya dari belanja pos Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah adalah :

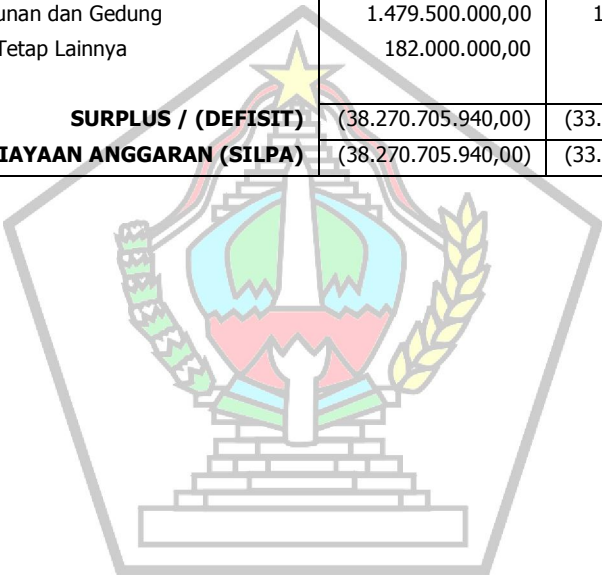
No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Penunjang Operasional KDH / WKDH	398.400.000,00
	Jumlah	398.400.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
s.d 31 Desember 2014

Urusan : 1 URUSAN WAJIB
Pemerintahan : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
Bidang : 1.20 PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Pemerintahan : 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
Unit Organisasi : 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
2	BELANJA	38.270.705.940,00	33.712.782.678,00	(4.557.923.262,00)
2.1	BELANJA OPERASI	35.575.405.940,00	31.069.456.928,00	(4.505.949.012,00)
2.1.1	Belanja Pegawai	11.165.245.000,00	10.438.230.976,00	(727.014.024,00)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.396.360.940,00	20.617.558.452,00	(3.778.802.488,00)
2.1.5	Belanja Hibah	13.800.000,00	13.667.500,00	(132.500,00)
2.2	BELANJA MODAL	2.695.300.000,00	2.643.325.750,00	(51.974.250,00)
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	1.033.800.000,00	998.730.750,00	(35.069.250,00)
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	1.479.500.000,00	1.463.645.000,00	(15.855.000,00)
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	182.000.000,00	180.950.000,00	(1.050.000,00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(38.270.705.940,00)	(33.712.782.678,00)	4.557.923.262,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(38.270.705.940,00)	(33.712.782.678,00)	4.557.923.262,00



BLITAR, Januari 2015
Pengguna Anggaran

ttd
Drs. PALAL ALI SANTOSO, MM
NIP. 195611280198603 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
NERACA

Per 31 Desember 2013 dan Per 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SEKRETARIAT DAERAH

KD. REK	URAIAN	2014	2013
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
1.1.1	Kas	0,00	181.528,48
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
1.1.3	Piutang	0,00	0,00
1.1.4	Piutang Lain-lain	267.000.000,00	641.268.490,00
1.1.5	Persediaan	6.463.424.429,20	669.211.860,03
1.1.9	Penyisihan Piutang Tidak tertagih	(2.800.000,00)	(10.500.000,00)
	JUMLAH ASET LANCAR	6.727.624.429,20	1.300.161.878,51
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
1.2.2	Investasi Permanen	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
1.3	ASET TETAP		
1.3.1	Tanah	691.874.500,00	691.874.500,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	31.096.240.907,44	37.362.865.603,24
1.3.3	Gedung dan Bangunan	3.923.983.770,00	2.580.459.462,00
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	390.170.861,00	390.170.861,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	498.050.400,00	317.100.400,00
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
	JUMLAH ASET TETAP	36.600.320.438,44	41.342.470.826,24
1.4	DANA CADANGAN		
1.4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA		
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	300.994.500,00	97.934.500,00
1.5.5	Aset Lain-lain	495.767.250,00	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	796.761.750,00	97.934.500,00
	JUMLAH ASET	44.124.706.617,64	42.740.567.204,75
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2.1.2	Utang Bunga	0,00	0,00
2.1.3	Utang Pajak	0,00	0,00



2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
2.2.2	Utang Luar Negeri	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3	EKUITAS DANA		
3.1	EKUITAS DANA LANCAR		
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	0,00
3.1.2	Cadangan untuk Piutang	264.200.000,00	630.768.490,00
3.1.3	Cadangan untuk Persediaan	6.463.424.429,20	669.211.860,03
3.1.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	0,00	0,00
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	181.528,48
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	6.727.624.429,20	1.300.161.878,51
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI		
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	36.600.320.438,44	41.342.470.826,24
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	796.761.750,00	97.934.500,00
3.2.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	37.397.082.188,44	41.440.405.326,24
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN		
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA	44.124.706.617,64	42.740.567.204,75
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	44.124.706.617,64	42.740.567.204,75

BLITAR, Januari 2015

Pengguna Anggaran

ttd

Drs. PALAL ALI SANTOSO, MM

NIP. 195611280198603 1 013



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2014 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2014 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Tahun 2014 pada SKPD Sekretariat Daerah tidak ada target Pendapatan.

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 33.712.782.678,00 atau mencapai 88,09 % dari anggarannya sejumlah Rp. 38.270.705.940,00.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2013 dan tahun 2014 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 44.124.706.617,64 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 6.727.624.429,20 , investasi jangka panjang sebesar Rp 0,- , aset tetap sebesar Rp. 36.600.320.438,44 , dana cadangan Rp. 0,- dan aset lainnya sebesar Rp. 0,-

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp.0,- dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp.0,-

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 44.124.706.617,64 yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp. 6.727.624.429,20 ekuitas dana investasi sebesar Rp. 37.397.082.188,44 dan ekuitas dana cadangan sebesar Rp. 0,-

c. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain



mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 3/E);
 13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 42/E);
 14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penambahan Lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Th 2010 Nomor 28/E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014 ;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014 ;

1.3. Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2014 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan , yang terdiri atas:

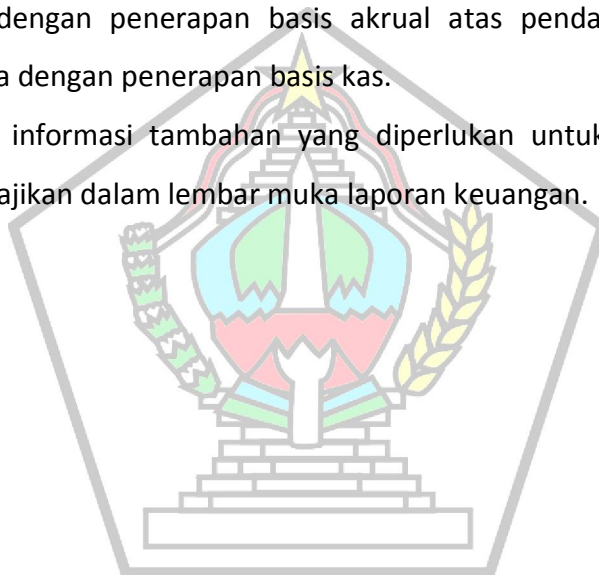
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca; dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).



1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.





BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan mencakup aspek kebijakan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2014, SKPD Sekretariat Daerah mempunyai 22 (dua puluh dua) program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat 72 kegiatan yang mengikutinya.

Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;
8. Program peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah;
9. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
10. Program Penataan peraturan Perundang-undangan;
11. Program Penataan daerah Otonomi Baru;
12. Program Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan;
13. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;



14. Program Peningkatan Efektifitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat daerah;
15. Program Peningkatan Mutu perencanaan Pembangunan di Bidang Administrasi pembangunan;
16. Program Peningkatan Kerjasama Dengan Pemerintah Pusat;
17. Program Peningkatan Kualitas pelayanan Informasi;
18. Program pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;
19. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
20. Program peningkatan Kesejahteraan petani;
21. Program Peningkatan Sumber Daya Alam;
22. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;





BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

SKPD Sekretariat Daerah memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014 secara keseluruhan sebesar sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	Pendapatan	0,00
2	Belanja Operasi	35.575.405.940,00
3	Belanja Modal	2.695.300.000,00

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh SKPD Sekretariat Daerah berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014 untuk Anggaran Belanja sebesar Rp. 38.270.705.940,00 dan Anggaran Pendapatan sebesar Rp 0,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada SKPD Sekretariat Daerah selama tahun 2014 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00
2	Belanja	38.270.705.940,00	33.712.782.678,00	88,09
	- <i>Belanja Operasi</i>	35.575.405.940,00	31.069.456.928,00	87,33
	- <i>Belanja Modal</i>	2.695.300.000,00	2.643.325.750,00	98,07

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan Daerah

Tahun 2014 pada SKPD Sekretariat Daerah tidak ada target Pendapatan.

3.1.2. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2014 sebesar Rp. 33.712.782.678,00 atau mencapai 88,09% , dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp. 4.557.923.262,00 atau 11,91% persen dengan perincian :



No.	Uraian / Program / Kegiatan	Anggaran	Penyerapan s.d 31 Desember 2014	%	Selisih Lebih/Kurang
1	2	3	4	5	6
	Bagian Umum				
	Belanja Tidak langsung				
	Belanja Pegawai				
1	Gaji dan Tunjangan	8.790.230.000,00	8.354.201.976,00	95,04%	436.028.024,00
2	Tambahan penghasilan PNS	301.700.000,00	285.760.000,00	94,96%	15.940.000,00
	Jumlah Belanja Tidak langsung	9.091.930.000,00	8.639.961.976,00	95,04%	451.968.024,00

No.	Uraian / Program / Kegiatan	Anggaran PAK	Penyerapan s.d 31 Desember 2014	%	Selisih Lebih/Kurang
1	2	3	4	5	6
	Belanja Langsung				
	Bagian Pemerintahan				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
1	Sosialisasi Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa	179.885.000,00	150.235.000,00	83,52%	29.650.000,00
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
2	Koordinasi Penyusunan LPPD Tahun 2013 dan Fasilitasi Pelaksanaan EKPPD Tahun 2013	155.585.000,00	106.264.000,00	68,30%	49.321.000,00
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				
3	Fasilitasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD	40.226.000,00	13.190.000,00	32,79%	27.036.000,00
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				
4	Fasilitasi Kerja sama Antar Daerah	195.729.000,00	116.922.500,00	59,74%	78.806.500,00
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00	31.486.500,00	78,72%	8.513.500,00
6	Penyusunan Ranperda Tentang Desa	537.025.000,00	14.644.000,00	2,73%	522.381.000,00
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru				
7	Fasilitasi Penyelesaian Masalah/Sengketa Pertanahan	183.498.000,00	117.882.660,00	64,24%	65.615.340,00
8	Pembakuan nama-nama Geografis (Toponimi) di wil kecamatan	234.315.000,00	225.526.950,00	96,25%	8.788.050,00



9	Fasilitasi penyelesaian batas daerah	560.134.000,00	469.739.903,00	83,86%	90.394.097,00
	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur				
10	Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	92.989.000,00	77.355.800,00	83,19%	15.633.200,00
11	Fasilitasi penanganan kasus pada wilayah Pemerintah Desa / Kelurahan	98.694.000,00	76.814.000,00	77,83%	21.880.000,00
	Jumlah	2.318.080.000,00	1.400.061.313,00	60,40%	918.018.687,00
	Bagian Hukum				
	Program Penataan Peraturan PerUndang2an				
12	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	234.691.500,00	226.357.500,00	96,45%	8.334.000,00
13	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	42.214.500,00	39.490.250,00	93,55%	2.724.250,00
14	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	102.434.500,00	96.873.250,00	94,57%	5.561.250,00
15	Publikasi peraturan perundang-undangan	83.044.500,00	81.749.540,00	98,44%	1.294.960,00
16	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	72.479.500,00	65.150.400,00	89,89%	7.329.100,00
17	Sengketa Hukum dan penegakan peraturan perundang-undangan	601.488.500,00	366.173.250,00	60,88%	235.315.250,00
18	Penyuluhan Hukum dan Kadarkum	118.479.000,00	102.795.200,00	86,76%	15.683.800,00
19	Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	81.942.500,00	80.397.700,00	98,11%	1.544.800,00
20	Pemetaan Peraturan Daerah	80.164.500,00	77.817.250,00	97,07%	2.347.250,00
	Jumlah	1.416.939.000,00	1.136.804.340,00	80,23%	280.134.660,00
	Bagian Kesra				
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
21	Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial untuk Tempat Ibadah	53.704.000,00	53.584.000,00	99,78%	120.000,00
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				
22	Pelaksanaan kegiatan Lomba MTQ Tingkat Kabupaten	256.799.000,00	238.254.000,00	92,78%	18.545.000,00
23	Pembinaan Calon jamaah haji	469.806.500,00	458.003.500,00	97,49%	11.803.000,00
24	Rukyatul hilal awal romadhon, syawal dan dhulhijah	59.923.500,00	57.833.500,00	96,51%	2.090.000,00
	Program Pengembangan Nilai Budaya				
25	Penyelenggaraan ziarah leluhur kab. Blitar	207.388.500,00	207.388.500,00	100,00%	0,00



	Jumlah	1.047.621.500,00	1.015.063.500,00	96,89%	32.558.000,00
	Bagian Pembangunan				
	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
26	Bimbingan Teknis / Sertifikasi Perpres 54 Tahun 2010	50.071.500,00	41.474.400,00	82,83%	8.597.100,00
	Program peningkatan mutu perencanaan pembangunan di bidang Administrasi Pembangunan				
27	Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)	1.370.810.000,00	1.196.062.980,00	87,25%	174.747.020,00
	Program Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				
28	Pelaksanaan pengendalian Administrasi Penyelenggaraan Pembangunan	27.835.000,00	26.858.000,00	96,49%	977.000,00
	Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				
29	Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	97.183.500,00	95.145.800,00	97,90%	2.037.700,00
	Jumlah	1.545.900.000,00	1.359.541.180,00	87,94%	186.358.820,00
	Bagian Perekonomian				
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				
30	Monitoring Pupuk dan Pestisida	42.200.000,00	41.185.650,00	97,60%	1.014.350,00
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				
31	Peningkatan manajemen investasi daerah	101.350.000,00	97.588.600,00	96,29%	3.761.400,00
32	Sosialisasi Aturan di Bidang Penanaman Modal	53.250.000,00	37.687.550,00	70,77%	15.562.450,00
	Program Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan				
33	Pengawasan dan Pengendalian Raskin	26.600.000,00	26.451.500,00	99,44%	148.500,00
34	Pendistribusian raskin dan satgas raskin di titik distribusi ke penerima manfaat	309.310.000,00	165.075.300,00	53,37%	144.234.700,00
35	Penyelenggaraan Pasar Murah Kabupaten Blitar Menjelang Idul Fitri	530.490.000,00	528.748.000,00	99,67%	1.742.000,00
	Program Peningkatan Sumber Daya Alam				
36	Monitoring Pengembangan Sumber Daya Alam	25.000.000,00	6.526.250,00	26,11%	18.473.750,00
37	Penyelenggaraan Promosi Pameran Produk unggulan Kabupaten Blitar	516.500.000,00	494.693.800,00	95,78%	21.806.200,00
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				



38	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai	250.000.000,00	112.158.000,00	44,86%	137.842.000,00
39	Monitoring dan evaluasi DBHCHT	23.400.000,00	4.847.000,00	20,71%	18.553.000,00
	Jumlah	1.878.100.000,00	1.514.961.650,00	80,66%	363.138.350,00
	Bagian Organisasi				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
40	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	20.603.000,00	20.296.650,00	98,51%	306.350,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
41	Fasilitasi Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Sekretariat daerah	28.812.550,00	28.367.250,00	98,45%	445.300,00
	Peningkatan Efektifitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah				
42	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	85.502.500,00	80.826.500,00	94,53%	4.676.000,00
43	Pendampingan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	107.270.000,00	95.541.250,00	89,07%	11.728.750,00
44	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	86.105.000,00	84.020.000,00	97,58%	2.085.000,00
45	Gelar Kelompok Budaya Kerja Propinsi	116.822.500,00	89.210.000,00	76,36%	27.612.500,00
46	Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Bupati tentang pelayanan publik	83.840.000,00	82.052.000,00	97,87%	1.788.000,00
47	Fasilitasi dan Koordinasi Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	113.015.000,00	106.394.500,00	94,14%	6.620.500,00
48	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	75.400.000,00	72.742.500,00	96,48%	2.657.500,00
49	Pendampingan pemeliharaan ISO 9001-2008	95.235.950,00	90.289.000,00	94,81%	4.946.950,00
50	Pendampingan Penyusunan Evaluasi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar	121.740.500,00	111.877.000,00	91,90%	9.863.500,00
51	Penyusunan Aplikasi Informasi Perangkat Daerah	102.543.000,00	92.138.500,00	89,85%	10.404.500,00
52	Peny. Apliks. Data Base Bid.Orgns.& Tatalaksana	128.110.000,00	125.001.000,00	97,57%	3.109.000,00
	Jumlah	1.165.000.000,00	1.078.756.150,00	92,60%	86.243.850,00
	Bagian Umum				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
53	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	3.799.173.500,00	3.030.585.475,00	79,77%	768.588.025,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				



54	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.405.204.000,00	3.288.791.661,00	96,58%	116.412.339,00
	Program peningkatan disiplin aparatur				
55	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	6.823.225.000,00	6.175.422.500,00	90,51%	647.802.500,00
56	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	66.175.000,00	60.775.000,00	91,84%	5.400.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
57	Pendidikan dan pelatihan formal	41.350.000,00	10.277.500,00	24,85%	31.072.500,00
58	Bimbingan dan Sosialisasi Kepemimpinan Pejabat Pemerintah Daerah	354.600.000,00	351.777.500,00	99,20%	2.822.500,00
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
59	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13.200.000,00	9.983.000,00	75,63%	3.217.000,00
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah				
60	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	776.830.000,00	682.707.100,00	87,88%	94.122.900,00
61	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	915.096.000,00	681.688.850,00	74,49%	233.407.150,00
62	Penyelenggaraan kerumahtanggaan KDH / WKDH	1.352.536.000,00	1.287.064.075,00	95,16%	65.471.925,00
63	Peningkatan sarana dan prasarana KDH / WKDH	160.584.000,00	147.417.624,00	91,80%	13.166.376,00
	Program Peningkatan Kerjasama Dengan Pemerintah Pusat				
64	Operasional Mess/Guest House Jakarta	196.360.000,00	112.761.362,00	57,43%	83.598.638,00
	Jumlah	17.904.333.500,00	15.839.251.647,00	88,47%	2.065.081.853,00
	Bagian Humas dan protokol				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
65	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	16.760.000,00	12.708.250,00	75,82%	4.051.750,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
66	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	23.300.000,00	22.240.000,00	95,45%	1.060.000,00
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi				
67	Publikasi dan advetorial potensi / hasil pembangunan	803.090.000,00	797.590.000,00	99,32%	5.500.000,00



68	Peningkatan Pelayanan Seremonial dan keprotokolan	300.000.000,00	196.922.000,00	65,64%	103.078.000,00
69	Operasional Korsik	124.000.000,00	117.535.000,00	94,79%	6.465.000,00
70	Peningkatan pelayanan kehumasan	257.991.940,00	208.004.172,00	80,62%	49.987.768,00
71	Dokumentasi kebijakan keberhasilan pembangunan	127.660.000,00	125.618.500,00	98,40%	2.041.500,00
72	Sosialisasi tentang Ketentuan Cukai di Media Informasi	250.000.000,00	247.763.000,00	99,11%	2.237.000,00
	Jumlah	1.902.801.940,00	1.728.380.922,00	90,83%	174.421.018,00
	Jumlah Belanja langsung	29.178.775.940,00	25.072.820.702,00	85,93%	4.105.955.238,00
	Jumlah Total Belanja	38.270.705.940,00	33.712.782.678,00	88,09%	4.557.923.262,00

3.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

- Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;
- Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- Kurang tersedianya SDM Aparatur yang handal dan profesional di masing –masing bidang terutama dalam bidang pengelolaan keuangan.
- Kurangnya kesempatan dalam mengikuti pendidikan pelatihan di masing – masing bidang.
- Perencanaan penganggaran rekening belanja di awal tahun anggaran yang kurang optimal.
- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program dan kegiatan.
- Adanya multi tafsir dalam pemahaman peraturan – peraturan khususnya bidang pengelolaan keuangan, sehingga ditengah pelaksanaan kinerja keuangan terdapat kendala dalam memahami oleh para pelaksana atau komponen-komponen yang ada untuk mencapai target keuangan yang telah ditetapkan.
- Belum validnya data tentang administrasi barang daerah yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

d. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.



1) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

3) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

4) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.



5) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

7) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyalia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat



diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
 - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

f. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan Akuntansi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penambahan Lampiran atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar, terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Blitar tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar, namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain:

a. Pengakuan

Pengakuan aset tetap sesuai nilai perolehannya, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Kewajiban sesuai dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

b. Kapitalisasi

Penetapan Batasan Minimal Kapitalisasi aset dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014.

c. Penyusutan

Belum diterapkannya penyusutan aset tetap dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014, dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan inventarisasi aset.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
a. Aset	44.124.706.617,64	42.740.567.204,75
Saldo Aset per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 44.124.706.617,64 dengan rincian sebagai berikut.		

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
(1)	Aset Lancar	6.727.624.429,20	1.300.161.878,51
(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
(3)	Aset Tetap	36.600.320.438,44	41.342.470.826,24
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
(5)	Aset Lainnya	796.761.750,00	97.934.500,00
Jumlah Aset		44.124.706.617,64	42.740.567.204,75

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1) Aset Lancar	6.727.624.429,20	1.300.161.878,51
Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 6.727.624.429,20 , dengan rincian sebagai berikut :		

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
(a)	Kas	0,00	181.528,48
(b)	Piutang Retribusi	0,00	0,00
(c)	Piutang lain-lain	267.000.000,00	641.268.490,00
(d)	Persediaan	6.463.424.429,20	669.211.860,03
(e)	Penyisihan piutang tidak tertagih	(2.800.000,00)	(10.500.000,00)
Jumlah		6.727.624.429,20	1.300.161.878,51

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(a) Kas	0,00	181.528,48

Saldo Kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00 terdiri atas:

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp.)	Tahun 2013 (Rp.)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	181.528,48
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	181.528,48

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(b) Piutang Retribusi	0,00	0,00

Saldo Piutang Retribusi per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00 .



	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(c) Piutang lain-lain	267.000.000,00	641.268.490,00

Saldo piutang lain-lain per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 267.000.000,00, terdiri dari:

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Piutang Bagian Lancar penjualan angsuran kendaraan dinas	14.000.000,00
2	Sisa Piutang atas sewa dibayar di muka untuk Rumah Dinas Wakil Bupati	78.000.000,00
3	Piutang atas sewa dibayar dimuka untuk sewa Mess Jakarta	175.000.000,00
Jumlah		267.000.000,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(d) Persediaan	6.463.424.429,20	669.211.860,03

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih ada, yang bersifat habis pakai dan diperoleh untuk mendukung kegiatan operasional, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 6.463.424.429,20 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Persediaan	Jumlah
1	2	3
1	Alat Tulis Kantor (ATK)	76.618.362,46
2	Alat Listrik	13.850.250,00
3	Bahan Pakaian Dinas	6.191.834.083,24
4	Perangko	70.000,00
5	Materai	600.500,00
6	Buku Cetak	26.602.440,00
7	Blangko	103.183.080,00
8	Map	17.361.325,00
9	Amplop	4.369.377,50
10	Plakat / Vandel	19.000.000,00
11	Alat Kebersihan	9.935.011,00
Jumlah		6.463.424.429,20

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(e) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(2.800.000,00)	(10.500.000,00)

Saldo ini merupakan koreksi nilai piutang yang diharapkan dapat tertagih, dengan penghitungan yang tidak tertagih : 20 % x Rp. 14.000.000,00 = Rp.



2.800.000,00 (Peraturan Bupati No. 36 th. 2012 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar)

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
2) Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo Investasi jangka Panjang per 31 Desember 2014 sebesar nihil.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
3) Aset Tetap	36.600.320.438,44	41.342.470.826,24

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp 36.600.320.438,44 dan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 41.342.470.826,24 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
(a)	Tanah	691.874.500,00	691.874.500,00
(b)	Peralatan dan Mesin	31.096.240.907,44	37.362.865.603,24
(c)	Gedung dan Bangunan	3.923.983.770,00	2.580.459.462,00
(d)	Jalan, Jaringan dan Instalasi	390.170.861,00	390.170.861,00
(e)	Aset Tetap Lainnya	498.050.400,00	317.100.400,00
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Aset		36.600.320.438,44	41.342.470.826,24

Sedangkan mutasi pengurangan dalam Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 4.742.150.387,80 dapat dijelaskan sebagai berikut :

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(a) Tanah	691.874.500,00	691.874.500,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2014 sebesar Rp 691.874.500,00 dengan perincian sebagai berikut :

a.	Saldo awal	Rp. 691.874.500,00
b.	Penambahan Aset tahun 2014	Rp. 0,00
c.	Total	Rp. 691.874.500,00

Kode Unit : 1.20.03.01 / Bagian Pemerintahan					
KODE REK	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO
1.3.1	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan / Perusahaan	125.274.500,00	-	-	125.274.500,00
	JUMLAH	125.274.500,00	-	-	125.274.500,00
Kode Unit : 1.20.03.07 / Bagian Umum					
KODE REK	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO
1.3.1	Tanah Kampung	501.600.000,00	-	-	501.600.000,00
1.3.1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	65.000.000,00	-	-	65.000.000,00
	JUMLAH	566.600.000,00	-	-	566.600.000,00
	JUMLAH TOTAL	691.874.500,00	-	-	691.874.500,00



	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	31.096.240.907,44	37.362.865.603,24
Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2014 sebesar Rp 31.096.240.907,44 dengan perincian sebagai berikut:		
a. Saldo awal		Rp. 37.362.865.603,24
b. Penambahan Aset tahun 2014		Rp. 3.240.940.730,03
c. Pengurangan Aset tahun 2014		(Rp. 9.507.565.425,83)
d. Total		Rp. 31.096.240.907,44

Kode Unit : 1.20.03.01 / Bagian Pemerintahan					
KODE REK	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO
1.3.2	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.513.000,00	-	-	25.513.000,00
1.3.2	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.680.000,00	-	-	9.680.000,00
1.3.2	Personal Komputer	92.324.000,00	8.760.000,00	24.900.000,00	76.184.000,00
1.3.2	Peralatan komputer Mainframe	18.832.000,00	-	-	18.832.000,00
1.3.2	Peralatan Personal komputer	21.870.000,00	750.000,00	4.550.000,00	18.070.000,00
1.3.2	Peralatan Studio Visual	750.000,00	-	750.000,00	-
1.3.2	Peralatan Studio Video dan Film	19.206.000,00	-	-	19.206.000,00
	JUMLAH	188.175.000,00	9.510.000,00	30.200.000,00	167.485.000,00
Kode Unit : 1.20.03.02 / Bagian Hukum					
KODE REK	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO
1.3.2	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	27.218.000,00	-	-	27.218.000,00
1.3.2	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	9.990.000,00	-	-	9.990.000,00
1.3.2	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
1.3.2	Personal Komputer	48.100.000,00	-	-	48.100.000,00
1.3.2	Peralatan Personal komputer	17.000.000,00	-	-	17.000.000,00
1.3.2	Peralatan Jaringan	16.417.500,00	-	-	16.417.500,00
1.3.2	Peralatan Studio Visual	7.800.000,00	-	-	7.800.000,00
	JUMLAH	131.525.500,00	-	-	131.525.500,00
Kode Unit : 1.20.03.03 / Bagian Kesejahteraan Rakyat					
KODE REK	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO
1.3.2	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.269.000,00	13.588.500,00	-	25.857.500,00
1.3.2	Personal Komputer	35.712.000,00	18.975.000,00	-	54.687.000,00
1.3.2	Peralatan Komputer Mainframe	3.600.000,00	-	-	3.600.000,00
1.3.2	Peralatan Personal komputer	840.000,00	-	-	840.000,00
1.3.2	Peralatan Studio Visual	14.850.000,00	-	-	14.850.000,00
	JUMLAH	67.271.000,00	32.563.500,00	-	99.834.500,00
Kode Unit : 1.20.03.04 / Bagian Pembangunan					
KODE REK	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO
1.3.2	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	24.538.000,00	-	-	24.538.000,00
1.3.2	Alat Kantor Reproduksi/ Pengganda (Stensil/Foto copy)	34.925.000,00	-	-	34.925.000,00



1.3.2	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	33.330.000,00	-	-	33.330.000,00
1.3.2	Alat Kantor Lainnya	30.995.000,00	-	25.000.000,00	5.995.000,00
1.3.2	Meubelair	66.192.000,00	5.491.200,00	-	71.683.200,00
1.3.2	Alat Pembersih	1.980.000,00	-	-	1.980.000,00
1.3.2	Alat Pendingin	21.560.000,00	-	-	21.560.000,00
1.3.2	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	35.846.200,00	16.500.000,00	5.491.200,00	46.855.000,00
1.3.2	Personal Komputer	490.828.000,00	-	-	490.828.000,00
1.3.2	Peralatan Personal komputer	47.960.000,00	29.960.000,00	4.990.000,00	72.930.000,00
1.3.2	Peralatan Jaringan	351.345.379,00	4.990.000,00	17.800.000,00	338.535.379,00
1.3.2	Kursi Kerja Pejabat	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00
1.3.2	Peralatan Studio Visual	26.289.400,00	132.084.000,00	-	158.373.400,00
1.3.2	Peralatan Studio Video dan Film	-	10.799.000,00	10.799.000,00	-
1.3.2	Peralatan Studio Video dan Film A	4.950.000,00	-	-	4.950.000,00
1.3.2	Alat Komunikasi Telephone	18.760.000,00	-	-	18.760.000,00
1.3.2	Alat Komunikasi Sosial	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
1.3.2	Alat Laboratorium Lainnya	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
	JUMLAH	1.200.248.979,00	199.824.200,00	64.080.200,00	1.335.992.979,00
Kode Unit : 1.20.03.05 / Bagian Perekonomian					
KODE REK	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO
1.3.2	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	13.244.000,00	-	-	13.244.000,00
1.3.2	Alat Kantor Lainnya	6.495.500,00	-	-	6.495.500,00
1.3.2	Komputer Unit / Jaringan	1.496.000,00	-	-	1.496.000,00
1.3.2	Personal Komputer	22.060.000,00	36.093.750,00	-	58.153.750,00
1.3.2	Peralatan Personal komputer	16.330.000,00	12.512.500,00	-	28.842.500,00
1.3.2	Peralatan Studio Visual	9.625.000,00	-	-	9.625.000,00
1.3.2	Peralatan Studio Video dan Film	19.943.000,00	-	-	19.943.000,00
1.3.2	Alat Komunikasi Telephone	-	10.120.000,00	-	10.120.000,00
	JUMLAH	89.193.500,00	58.726.250,00	-	147.919.750,00
Kode Unit : 1.20.03.06 / Bagian Organisasi					
KODE REK	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO
1.3.2	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12.269.000,00	-	-	12.269.000,00
1.3.2	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	13.588.500,00	-	13.588.500,00
1.3.2	Alat Pendingin	-	20.680.000,00	-	20.680.000,00
1.3.2	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.400.000,00	-	-	15.400.000,00
1.3.2	Personal Komputer	95.055.000,00	54.100.500,00	-	149.155.500,00
1.3.2	Peralatan Personal komputer	7.550.000,00	24.115.000,00	-	31.665.000,00
1.3.2	Peralatan Studio Video dan Film	16.630.000,00	-	-	16.630.000,00
	JUMLAH	146.904.000,00	112.484.000,00	-	259.388.000,00
Kode Unit : 1.20.03.07 / Bagian Umum					
KODE REK	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO
1.3.2	Electric Generating Set	532.101.888,42	-	-	532.101.888,42
1.3.2	Pompa	63.159.435,14	-	-	63.159.435,14
1.3.2	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	15.746.992.788,08	285.500.000,00	5.197.900.000,00	10.834.592.788,08
1.3.2	Kendaraan Bermotor Penumpang	1.300.750.000,00	251.825.000,00	-	1.552.575.000,00



1.3.2	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	250.106.590,92	201.750.000,00	-	451.856.590,92
1.3.2	Kendaraan Bermotor Khusus	707.426.500,00	-	679.401.500,00	28.025.000,00
1.3.2	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.296.402.472,22	-	1.603.797.500,80	6.692.604.971,42
1.3.2	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	38.206.000,00	-	38.206.000,00
1.3.2	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	-	150.000,00	150.000,00	-
1.3.2	Alat Kantor Mesin Ketik	31.622.143,60	-	-	31.622.143,60
1.3.2	Alat Kantor Mesin Hitung/Jumlah	810.000,00	-	10.000,00	800.000,00
1.3.2	Alat Kantor Reproduksi/Pengganda (Stensil/Foto copy)	83.063.519,94	-	-	83.063.519,94
1.3.2	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	211.837.094,23	46.833.000,01	11.833.000,00	246.837.094,23
1.3.2	Alat Kantor Lainnya	76.641.329,39	-	-	76.641.329,39
1.3.2	Meubelair	1.251.978.276,95	97.477.938,00	37.071.500,00	1.312.384.714,95
1.3.2	Alat Pengukur Waktu	324.000,00	69.000,00	69.000,00	324.000,00
1.3.2	Alat Pembersih	14.026.064,71	-	-	14.026.064,71
1.3.2	Alat Pendingin	363.583.948,77	120.338.500,00	110.438.500,00	373.483.948,77
1.3.2	Alat Dapur	64.628.933,76	-	0,01	64.628.933,75
1.3.2	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	711.684.101,24	-	-	711.684.101,24
1.3.2	Alat Pemadam Kebakaran	6.355.152,04	-	0,01	6.355.152,03
1.3.2	Alat Rumah Tangga Lainnya	-	6.559.800,00	6.559.800,00	-
1.3.2	Komputer Unit / Jaringan	30.500.000,00	-	30.500.000,00	-
1.3.2	Personal Komputer	1.918.959.486,37	256.150.000,00	87.434.350,00	2.087.675.136,37
1.3.2	Peralatan Personal komputer	244.406.418,69	55.515.450,01	36.915.450,00	263.006.418,69
1.3.2	Peralatan Jaringan	220.851.000,00	30.500.000,00	-	251.351.000,00
1.3.2	Lemari dan Arsip Pejabat	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-
1.3.2	Peralatan Studio Visual	935.156.377,02	168.450.000,00	76.350.000,00	1.027.256.377,02
1.3.2	Peralatan Studio Video dan Film	-	54.455.000,00	-	54.455.000,00
1.3.2	Alat Komunikasi Telephone	57.286.423,75	77.109.070,01	-	134.395.493,76
1.3.2	Alat Komunikasi Radio HF / FM	66.470.000,00	-	66.470.000,00	-
1.3.2	Alat Komunikasi Radio VHF	32.002.234,00	-	-	32.002.234,00
1.3.2	Alat Komunikasi Radio UHF	74.790.000,00	-	-	74.790.000,00
1.3.2	Alat -alat sandi	31.500.000,00	-	-	31.500.000,00
1.3.2	Peralatan Pemancar MF/MW	-	32.000.000,00	30.000.000,00	2.000.000,00
1.3.2	Peralatan Pemancar VHF / FM	-	522.112.000,00	17.000.000,00	505.112.000,00
1.3.2	Peralatan Pemancar UHF	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00
1.3.2	Peralatan Antena MF/MW	-	24.300.000,00	300.000,00	24.000.000,00
1.3.2	Peralatan Antena VHF / FM	-	361.422.842,00	300.000,00	361.122.842,00
1.3.2	Peralatan Antena SHF/Parabola	1.302.047.045,00	-	1.302.047.045,00	-
1.3.2	Switcher/Menara Antena	-	80.000.000,00	80.000.000,00	-
1.3.2	Alat Laboratorium Fisika	968.000,00	-	-	968.000,00
1.3.2	Alat Lab. Bidang Matematika	-	240.000,00	-	240.000,00
1.3.2	Alat Lab. Bidang IPA Dasar	-	768.000,00	-	768.000,00
1.3.2	Alat Peraga/ Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/ Ketrampilan Lain-Lain	3.343.000,00	-	1.008.000,00	2.335.000,00
	JUMLAH	34.631.774.224,24	2.727.731.600,03	9.383.555.645,83	27.975.950.178,44
Kode Unit : 1.20.03.09 / Bagian Humas dan Protokol					



KODE REK	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO
1.3.2	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.850.000,00	14.949.000,00	-	27.799.000,00
1.3.2	Alat Kantor Mesin Ketik	890.000,00	-	-	890.000,00
1.3.2	Alat Kantor Mesin Hitung/Jumlah	150.000,00	-	-	150.000,00
1.3.2	Alat Penyimpanan	14.880.000,00	-	3.000.000,00	11.880.000,00
1.3.2	Perlengkapan Kantor	216.150.000,00	-	-	216.150.000,00
1.3.2	Alat Kantor Lainnya	216.150.000,00	-	-	216.150.000,00
1.3.2	Meubelair	2.000.000,00	3.000.000,00	-	5.000.000,00
1.3.2	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	80.469.910,00	41.300.875,00	-	121.770.785,00
1.3.2	Personal Komputer	100.815.000,00	13.420.000,00	-	114.235.000,00
1.3.2	Peralatan Personal komputer	24.235.000,00	5.940.000,00	1.575.000,00	28.600.000,00
1.3.2	Peralatan Studio Visual	227.468.495,00	7.920.000,00	25.154.580,00	210.233.915,00
1.3.2	Peralatan Studio Video dan Film	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
1.3.2	Alat Komunikasi Telephone	44.325.000,00	-	-	44.325.000,00
1.3.2	Alat Komunikasi Sosial	34.991.000,00	4.950.000,00	-	39.941.000,00
1.3.2	Peralatan Pemancar VHF/FM	23.837.000,00	-	-	23.837.000,00
1.3.2	Peralatan Kesenian	123.211.995,00	8.621.305,00	-	131.833.300,00
	JUMLAH	907.773.400,00	100.101.180,00	29.729.580,00	978.145.000,00
	JUMLAH TOTAL	37.362.865.603,24	3.240.940.730,03	9.507.565.425,83	31.096.240.907,44

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	3.923.983.770,00	2.580.459.462,00
Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2014 Rp 3.923.983.770,00 dengan perincian sebagai berikut :		
• Saldo awal		Rp. 2.580.459.462,00
• Penambahan Aset tahun 2014		Rp. 1.517.825.000,00
• Pengurangan Aset tahun 2014		(Rp. 174.300.692,00)
• Total		Rp. 3.923.983.770,00

Kode Unit : 1.20.03.04 / Bagian Pembangunan					
KODE REK	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO
1.3.3	Bangunan Gedung Kantor	40.950.800,00	-	-	40.950.800,00
	JUMLAH	40.950.800,00	-	-	40.950.800,00
Kode Unit : 1.20.03.07 / Bagian Umum					
KODE REK	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO
1.3.3	Bangunan Gedung Kantor	754.215.450,00	1.399.020.000,00	162.517.650,00	1.990.717.800,00
1.3.3	Bangunan Gudang	23.449.800,00	-	11.648.440,00	11.801.360,00
1.3.3	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	91.100.000,00	-	-	91.100.000,00
1.3.3	Bangunan Gedung Garasi/Pool	88.900.000,00	-	-	88.900.000,00
1.3.3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	128.700.000,00	118.805.000,00	-	247.505.000,00
1.3.3	Rumah Negara Golongan I	1.079.485.412,00	-	134.602,00	1.079.350.810,00
1.3.3	Rumah Negara Golongan III	373.658.000,00	-	-	373.658.000,00
	JUMLAH	2.539.508.662,00	1.517.825.000,00	174.300.692,00	3.883.032.970,00



	JUMLAH TOTAL	2.580.459.462,00	1.517.825.000,00	174.300.692,00	3.923.983.770,00
--	---------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(d) Jalan, Jaringan dan Instalasi	390.170.861,00	390.170.861,00

Saldo jalan, jaringan dan instalasi per 31 Desember 2014 sebesar Rp 390.170.861,00 dengan perincian sebagai berikut :

• Saldo awal	Rp. 390.170.861,00
• Penambahan aset tahun 2014	Rp. 0,00
• Total	Rp. 390.170.861,00

Kode Unit : 1.20.03.07 / Bagian Umum					
KODE REK	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO
1.3.4	Air Bersih/ Air Baku Lainnya	94.469.250,00	-	2.975.000,00	91.494.250,00
1.3.4	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	-	296.900.000,00	-	296.900.000,00
1.3.4	Jaringan Distribusi	295.701.611,00	-	293.925.000,00	1.776.611,00
	Jumlah	390.170.861,00	296.900.000,00	296.900.000,00	390.170.861,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(e) Aset Tetap Lainnya	498.050.400,00	317.100.400,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp 498.050.400,00 dengan perincian sebagai berikut :

• Saldo awal	Rp. 317.100.400,00
• Penambahan Aset tahun 2014	Rp. 180.950.000,00
• Total	Rp. 498.050.400,00

Kode Unit : 1.20.03.02 / Bagian Hukum					
KODE REK	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO
1.3.5	Buku Umum	7.002.900,00	-	-	7.002.900,00
1.3.5	Buku Ilmu Sosial	-	3.850.000,00	-	3.850.000,00
	JUMLAH	7.002.900,00	3.850.000,00	-	10.852.900,00
Kode Unit : 1.20.03.05 / Bagian Perekonomian					
KODE REK	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO
1.3.5	Peta/Atlas/Globe	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00
	JUMLAH	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00
Kode Unit : 1.20.03.07 / Bagian Umum					
KODE REK	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO
1.3.5	Buku Umum	61.470.000,00	-	-	61.470.000,00
1.3.5	Buku Ilmu Sosial	11.112.000,00	-	-	11.112.000,00
1.3.5	Peta	66.000,00	-	-	66.000,00
1.3.5	Alat Kesenian	198.000.000,00	177.100.000,00	-	375.100.000,00
1.3.5	Alat Olah Raga Lainnya	-	975.000,00	975.000,00	-



1.3.5	Tanaman Holtikultura	34.949.500,00	-	-	34.949.500,00
	JUMLAH	305.597.500,00	178.075.000,00	975.000,00	482.697.500,00
	JUMLAH TOTAL	317.100.400,00	181.925.000,00	975.000,00	498.050.400,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Saldo Kontruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
4) Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
5) Aset Lainnya	796.761.750,00	97.934.500,00

Komposisi dan nilai saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp 796.761.750,00, dengan perincian sebagai berikut :

- Saldo awal Rp. 97.934.500,00
- Penambahan Aset tahun 2014 Rp. 698.827.250,00
- **Total** Rp. **796.761.750,00**

No	Uraian	Per 31 Desember 2014 (Rp)	Per 31 Desember 2013 (Rp)
(a)	Aset Tak berwujud	300.994.500,00	97.934.500,00
(b)	Aset lain-lain	495.767.250,00	0,00
	Jumlah Aset lainnya	796.761.750,00	97.934.500,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
b. Kewajiban	0,00	0,00

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
2) Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00.



	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
c. Ekuitas Dana	44.124.706.617,64	42.740.567.204,75
Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL) dan Ekuitas Dana Investasi (EDI). Ekuitas Dana per 31 Desember 2014 sebesar Rp 44.124.706.617,64 dengan rincian sebagai berikut :		

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1) Ekuitas Dana Lancar	6.727.624.429,20	1.300.161.878,51
Saldo akun ini merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan hutang jangka pendek, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 6.727.624.429,20 dengan rincian sebagai berikut.		

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Cadangan Piutang	264.200.000,00
(b)	Cadangan Persediaan	6.463.424.429,20
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		6.727.624.429,20

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
2) Ekuitas Dana Investasi	37.397.082.188,44	41.440.405.326,24
Saldo akun ini merupakan kekayaan yang berasal dari selisih Investasi Jangka Panjang ditambah Aset Tetap dan Aset Lainnya dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 37.397.082.188,44 sebagai berikut :		

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00
(b)	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	36.600.320.438,44
(c)	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	796.761.750,00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		37.397.082.188,44

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
3) Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00
Saldo akun ini merupakan kekayaan yang dicadangkan, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 0,00.		

2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
--------------------------	--------------------------



a. Pendapatan

0,00

0,00

Pendapatan meliputi semua penerimaan dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Tahun 2014 tidak ada target untuk Pendapatan.

b. Belanja

31 Desember 2014
(Rp)
33.712.782.678,00

31 Desember 2013
(Rp)
51.661.639.862,00

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2014 anggaran dan realisasi belanja daerah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

31 Desember 2014
(Rp)
31.069.456.928,00

31 Desember 2013
(Rp)
43.327.497.028,00

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2014 Rp 31.069.456.928,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Operasi	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
1	2	3	4	5
(a)	Belanja Pegawai	11.165.245.000,00	10.438.230.976,00	9.794.546.466,00
(b)	Belanja Barang dan Jasa	24.396.360.940,00	20.617.558.452,00	33.532.950.562,00
(c)	Belanja Hibah	13.800.000,00	13.667.500,00	-
Jumlah		35.575.405.940,00	31.069.456.928,00	43.327.497.028,00

Selanjutnya Belanja Operasi tahun 2014 dijelaskan dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

No	Belanja Operasi	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
1	2	3	4	5
	Belanja Tidak Langsung			
	Belanja Pegawai	9.091.930.000,00	8.639.961.976,00	8.264.529.466,00
	Gaji dan Tunjangan	8.790.230.000,00	8.354.201.976,00	7.993.114.966,00
	Tambahan Penghasilan PNS	301.700.000,00	285.760.000,00	271.414.500,00
1	Jumlah Belanja Tak Langsung	9.091.930.000,00	8.639.961.976,00	8.264.529.466,00
	Belanja Langsung			
	Belanja Pegawai	2.073.315.000,00	1.798.269.000,00	1.530.017.000,00
	Honorarium PNS	1.959.965.000,00	1.685.405.000,00	1.383.945.000,00
	Honorarium Non PNS	-	-	16.000.000,00
	Lembur	113.350.000,00	112.864.000,00	130.072.000,00
	Belanja Barang/Jasa	24.410.160.940,00	20.631.225.952,00	33.532.950.562,00
	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	874.837.600,00	751.570.622,00	1.481.591.610,00
	Belanja Bahan/Material	787.950.000,00	772.859.515,00	818.282.716,00
	Belanja Jasa Kantor	3.182.856.940,00	2.753.051.896,00	17.141.894.590,00
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	487.255.000,00	385.233.048,00	280.878.678,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	892.154.500,00	866.679.140,00	1.060.549.415,00



	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang /Parkir	321.609.000,00	266.412.000,00	636.174.450,00
	Sewa Sarana Mobilitas Darat	68.000.000,00	65.600.000,00	82.800.000,00
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	333.130.000,00	305.732.500,00	342.318.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	2.589.274.500,00	1.969.835.970,00	2.416.205.600,00
	Belanja Pakaian Dinas dan atributnya	3.806.875.000,00	3.368.902.500,00	240.029.000,00
	Belanja Pakaian Kerja	2.000.000,00	1.430.000,00	33.247.000,00
	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.299.100.000,00	3.110.450.500,00	3.423.273.500,00
	Belanja Perjalanan Dinas	4.933.958.400,00	3.917.820.311,00	3.544.832.154,00
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	525.280.000,00	443.377.000,00	345.882.500,00
	Belanja Pemeliharaan	741.900.000,00	715.517.950,00	742.015.599,00
	Jasa Konsultasi	1.260.580.000,00	788.735.500,00	737.475.750,00
	Transport Lokal Non PNS	224.600.000,00	78.100.000,00	205.500.000,00
	Barang yang diserahkan ke masyarakat	13.800.000,00	13.667.500,00	-
	Uang yang diberikan ke masyarakat	65.000.000,00	56.250.000,00	-
2	Jumlah Belanja Langsung	26.483.475.940,00	22.429.494.952,00	35.062.967.562,00
Jumlah 1 dan 2		35.575.405.940,00	31.069.456.928,00	43.327.497.028,00

Realisasi Tahun 2014
(Rp)

Realisasi Tahun 2013
(Rp)

1) Belanja Modal 2.643.325.750,00 8.334.142.834,00

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp 2.643.325.750,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Modal	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
1	2	3	4	5
1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin			
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	3.897.220.334,00
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	107.683.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor / AC	31.000.000,00	30.580.000,00	30.590.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	733.000.000,00	702.196.750,00	1.054.460.400,00
	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	50.000.000,00	49.200.000,00	197.760.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	-	-	49.677.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	-	-	558.895.000,00



	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	172.800.000,00	171.634.000,00	679.358.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	12.000.000,00	10.120.000,00	44.325.000,00
	Jumlah 1	1.033.800.000,00	998.730.750,00	6.619.968.734,00
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan dan Gedung			
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.479.500.000,00	1.463.645.000,00	1.511.770.500,00
	Jumlah 2	1.479.500.000,00	1.463.645.000,00	1.511.770.500,00
3	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya			
	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4.000.000,00	3.850.000,00	4.403.600,00
	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	178.000.000,00	177.100.000,00	198.000.000,00
	Jumlah 3	182.000.000,00	180.950.000,00	202.403.600,00
	Total Belanja Modal	2.695.300.000,00	2.643.325.750,00	8.334.142.834,00



BLITAR, Januari 2015
Pegguna Anggaran
ttd

Drs. PALAL ALI SANTOSO, MM
NIP. 195611280198603 1 013